

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, 2012, *Bantuan Keuangan Partai Politik Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*, Yayasan Perludem, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- KOPEL dan Kemitraan, 2013, *Pembiayaan Partai Politik Sulawesi Selatan 2013*, KOPEL dan Kemitraan, Makassar.
- Miriam Budihardjo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, S.Stp, 2015, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- P.K Poerwantana, 1994, *Partai Politik Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ramlam Surbakti dan Didik Supriyanto, 2011, *pengendalian Keuangan Partai Politik*, Kemitraan, Jakarta.
- Ramlam Surbakti, 2015, *Peta Permasalahan Dalam Keuangan Politik Indonesia*, Kemitraan, Jakarta.
- Rooseno, 2014, *Peneitian Tentang Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI- Press), Jakarta.

Tim Peneliti Kementerian Hukum dan Ham RI, *Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Ham RI, 2014).

Veri Junaidi, dkk., 2011, *Anomali Keuangan Partai Politik*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Untuk Partai Politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan

Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

### C. Website

Bijah Subijanto, *Penguatan Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi*

*Masyarakat*, <http://www.bappenas.go>.

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/daftar\\_partai\\_politik\\_di\\_indonesia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/daftar_partai_politik_di_indonesia)

ICW “*Laporan Keuangan Partai Politik Sangat Tertutup*”,

<http://www.antikorupsi.org/en/content/laporan-keuangan-partai-politik->

[sangat-tertutup](http://www.antikorupsi.org/en/content/laporan-keuangan-partai-politik-sangat-tertutup)

